

Menakar Pentingnya Kepemimpinan di Pemerintahan Desa

Muhammad Taufiq^a

^aPoliteknik STIA LAN Jakarta

e-mail : ^amuhammad.taufiq@stialan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menakar urgensi kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pasca implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Di tengah perdebatan mengenai dominasi kompetensi teknis aparatur versus kualitas figur pemimpin, kajian ini mengeksplorasi peran strategis Kepala Desa sebagai penentu kebijakan (*tone at the top*). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), artikel ini menyintesis berbagai literatur ilmiah dan pola empiris terkini melalui teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil telaah menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan prediktor yang lebih konsisten dan dominan dalam memengaruhi akuntabilitas dibandingkan kompetensi teknis semata. Gaya kepemimpinan partisipatif, transparan, dan visioner terbukti mampu memitigasi risiko maladministrasi serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas kepemimpinan tetap memerlukan dukungan variabel moderasi seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan berintegritas adalah pilar utama dalam membentengi organisasi desa dari inefisiensi. Rekomendasi kajian ini menekankan perlunya reposisi program pembinaan yang lebih fokus pada penguatan nilai moral dan kapasitas kepemimpinan bagi perangkat desa guna mewujudkan tata kelola yang inklusif dan akuntabel.

Kata Kunci: Kepemimpinan Desa, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa.

Assessing the Importance of Leadership in Village Government

Abstract

This study aims to assess the urgency of leadership in village governance, particularly in ensuring the accountability of Village Fund management following the implementation of Law No. 6 of 2014. Amidst the debate over the dominance of apparatus technical competence versus the quality of leadership, this study explores the strategic role of the Village Head as the primary decision-maker (*tone at the top*). Using a qualitative approach with a library research method, this article synthesizes various scientific literatures and recent empirical patterns through descriptive-analytical techniques. The findings indicate that leadership is a more consistent and dominant predictor of accountability compared to technical competence alone. Participatory, transparent, and visionary leadership styles are proven to mitigate the risk of maladministration and mobilize community participation. However, leadership effectiveness still requires support from moderating variables such as organizational commitment, internal control systems, and the utilization of information technology. This study concludes that adaptive and high-integrity leadership is the main pillar in shielding village organizations from inefficiency. The recommendations of this study emphasize the need for a repositioning of capacity-building programs that focus more on strengthening moral values and leadership capacity for village officials to achieve inclusive and accountable governance.

Keywords: Village Leadership, Accountability, Village Government.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa saat ini menduduki posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional Indonesia, terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan otonomi yang luas serta dukungan finansial yang signifikan melalui Dana Desa, dengan harapan desa dapat menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya (Shuha, 2018; Yatminiwati, 2017). Namun, besarnya wewenang dan sumber daya yang dikelola membawa tantangan besar terkait akuntabilitas dan efektivitas tata kelola (Latri & Abdurrahman, 2021; Sudarsa et al., 2022). Di tengah dinamika tersebut, unsur manusia yang menggerakkan roda birokrasi desa menjadi faktor penentu utama apakah sumber daya tersebut akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat atau justru terjebak dalam praktik maladministrasi (Hapsari & Sudaryanti, 2021; Taufiq & Harijanto, 2023).

Kepemimpinan di level desa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari birokrasi perkotaan atau tingkat pusat. Seorang Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai tokoh sentral yang memegang otoritas sosial dan budaya di masyarakat. Peran ganda ini menjadikan figur pemimpin sebagai pemberi warna utama atau *"tone at the top"* dalam setiap proses pengambilan keputusan. Efektivitas pemerintahan desa sangat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mampu mengonsolidasikan berbagai kepentingan serta menggerakkan perangkat desa di bawahnya untuk bekerja secara transparan dan berintegritas (Lembong et al., 2017).

Meskipun kompetensi teknis perangkat desa sering dianggap sebagai prasyarat utama dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel (Indranika et al., 2020; Sawitri & Gayatri,

2021), realita empiris menunjukkan pola yang lebih kompleks. Pelatihan teknis dan sertifikasi staf memang penting, namun tanpa arahan dan pengawasan dari pemimpin yang kuat, keahlian tersebut sering kali tidak memberikan dampak optimal terhadap akuntabilitas (Taufiq, 2024). Terdapat fenomena di mana kompetensi teknis yang tinggi justru disalahgunakan untuk menutupi ketidakberesan administratif ketika tidak disertai dengan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika (Pardede et al., 2023; Rizki et al., 2023; Santika et al., 2023). Hal ini memicu pertanyaan kritis mengenai mana yang sebenarnya lebih mendasar: kapasitas teknis staf atau kualitas kepemimpinan sang kepala desa.

Banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap akuntabilitas (Ayem & Fitriyaningsih, 2022; Marlina et al., 2021; Rasmini & Mimba, 2021; Ratmono et al., 2023; Sujatnika & Sulindawati, 2022). Di beberapa wilayah, kepemimpinan muncul sebagai faktor dominan, sementara di wilayah lain, partisipasi masyarakat atau sistem teknologi informasi dianggap lebih berperan (Rakhmanita et al., 2023; Karunia et al., 2022). Ketidakpastian hasil ini menunjukkan perlunya diskusi yang lebih mendalam untuk menakar sejauh mana pengaruh kepemimpinan benar-benar dapat menjadi pilar utama yang menopang integritas pemerintahan desa, terutama di tengah meningkatnya tuntutan publik akan transparansi pengelolaan anggaran.

Upaya untuk menakar pentingnya kepemimpinan pada pemerintahan desa dilakukan dengan meninjau berbagai literatur dan pola empiris yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Fokus utama kajian ini adalah untuk membedah apakah kepemimpinan memang memegang peran yang lebih krusial

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dibandingkan aspek kompetensi teknis dalam menjamin penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dalam hal pola rekrutmen, pembinaan moral pemimpin desa, maupun penguatan sistem kontrol internal demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan responsif.

Kepemimpinan bukanlah hal yang baru dalam menunjang efektivitas pengelolaan sebuah organisasi (Donkor, 2021; Ferdinandito & Haryani, 2021; Pradesa & Tanjung, 2021; Tanjung et al., 2023). Tanpa figur pemimpin yang mampu menavigasi tradisi administratif dan tuntutan akuntabilitas, besarnya anggaran desa justru berisiko menjadi sumber penyimpangan hukum daripada instrumen kesejahteraan. Sehingga pentingnya kajian ini juga dipicu oleh adanya pergeseran ekspektasi publik dan bawahan di lingkungan instansi pemerintah daerah. Di era disrupsi teknologi, pemimpin desa dituntut tidak hanya piawai dalam urusan administratif formal, tetapi juga harus mampu menampilkan sisi humanis, memiliki kemampuan adaptasi terhadap keberagaman generasi pegawai, serta mampu mengelola komunikasi yang efektif dalam lingkungan kerja yang serba tidak pasti. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan formal, melainkan kapasitas untuk mendapatkan penerimaan dari pengikut (*followers*) guna menciptakan sinergi dalam pencapaian tujuan strategis organisasi publik.

Kajian ini ditujukan untuk mengisi kesenjangan pemahaman mengenai model kepemimpinan yang paling adaptif bagi konteks perdesaan di Indonesia yang memiliki tradisi administratif unik. Dengan melakukan telaah kritis terhadap berbagai literatur empiris terkini, artikel ini bertujuan

memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan kapasitas pemimpin publik di daerah. Melalui identifikasi kepemimpinan yang efektif, diharapkan instansi pemerintah dapat memperkuat kapasitasnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih berkualitas, inklusif, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita otonomi desa.

B. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari literatur terdahulu, naskah kebijakan, dan artikel ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam kurun waktu terakhir. Fokus utama dari metode ini adalah mengeksplorasi secara mendalam tema kepemimpinan dan akuntabilitas di pemerintahan desa untuk mensintesis temuan-temuan empiris yang sering kali menunjukkan hasil yang kontradiktif antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Sumber data yang dianalisis mencakup dokumen-dokumen bibliografi, artikel jurnal yang menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, serta buku teks yang membahas keefektifan organisasi pemerintah desa. Peneliti melakukan pengumpulan data secara sistematis dengan menelaah abstrak, temuan penelitian, serta keterbatasan riset terdahulu guna mengidentifikasi pola dominan mengenai kepemimpinan di pemerintahan desa. Penggunaan data dari literatur terdahulu ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan lintas konteks administratif tanpa terbatas pada satu wilayah geografis tertentu.

Teknik analisis data dilakukan melalui model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan atau

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

verifikasi. Dalam tahap analisis, peneliti melakukan klasifikasi terhadap literatur berdasarkan variabel-variabel kunci seperti gaya kepemimpinan partisipatif, kompetensi aparat, dan tingkat akuntabilitas organisasi desa. Sintesis dari berbagai sumber data ini kemudian dibahas secara kritis untuk menakar posisi kepemimpinan dalam struktur pemerintahan desa, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi strategi pengembangan kepemimpinan yang relevan bagi tantangan tata kelola publik di masa depan.

C. PEMBAHASAN

Kepemimpinan kepala desa merupakan pilar fundamental yang menentukan efektivitas organisasi publik di tingkat akar rumput. Hasil telaah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang partisipatif dan visioner secara signifikan mampu menggerakkan kinerja pengelolaan dana desa menuju arah yang lebih akuntabel. Dalam konteks ini, figur kepala desa tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak aspirasi masyarakat yang mampu menyelaraskan tujuan organisasi dengan kebutuhan nyata warga. Keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin menggunakan otoritasnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan disiplin, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kepemimpinan kepala desa merupakan faktor determinan yang paling konsisten dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi empiris, gaya kepemimpinan yang partisipatif dan berorientasi pada keteladanan terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa (Lestari et al., 2023; Saputri & Muhsin, 2018). Kepemimpinan yang efektif di desa tidak hanya

terbatas pada pemenuhan tugas administratif, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan membangun koordinasi yang harmonis dengan lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menjamin keberhasilan program pembangunan (Padagi, 2013; Sujatnika & Sulindawati, 2022).

Dalam konteks akuntabilitas keuangan, peran kepemimpinan sering kali ditemukan lebih dominan dibandingkan dengan aspek kompetensi teknis aparatur semata. Temuan Taufiq, (2024) mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan prediktor yang lebih stabil dalam menjaga integritas dana desa, di mana pengaruhnya sering kali melampaui kemampuan teknis yang dimiliki oleh perangkat desa. Hal ini didukung oleh penelitian Wahyuningsih et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat mampu memperjelas target anggaran dan meningkatkan transparansi, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir melalui pengawasan yang bersifat demokratis dan partisipatif (Riyanto & Erman, 2017).

Meskipun kepemimpinan memiliki peran sentral, efektivitasnya dalam pemerintahan desa sangat bergantung pada integrasi dengan variabel pendukung lainnya seperti komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan terkadang tidak berpengaruh langsung terhadap pencegahan kecurangan jika tidak dimediasi oleh komitmen organisasi yang kuat atau didukung oleh aksesibilitas informasi desa yang memadai (Rizal & Hermanto, 2019; Sulistiyantoro & Zahara, 2023). Ketidakkonsistenan pengaruh kepemimpinan di beberapa wilayah, seperti yang ditemukan oleh Ikhwan et al., (2024) dan Ayem & Fitriyaningsi, (2022), menegaskan bahwa kepemimpinan harus beroperasi dalam

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

ekosistem yang melibatkan transparansi publik dan sistem keuangan desa yang terstandarisasi untuk mencapai hasil maksimal.

Lebih jauh lagi, kepemimpinan publik di desa saat ini bertransformasi menuju model yang lebih kompleks, di mana kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*) dan kecerdasan emosional menjadi kunci dalam mengembangkan potensi desa (Fauzi et al., 2023; Rahman et al., 2022). Pemimpin desa diharapkan mampu melakukan manajemen sumber daya manusia yang efektif melalui pengembangan kompetensi aparatur yang berkelanjutan agar pelayanan publik tetap prima (Prasetyo, 2019). Dengan menggabungkan aspek kepemimpinan yang adaptif dan penguatan kelembagaan hingga tingkat RT/RW, pemerintahan desa dapat mewujudkan tata kelola yang tidak hanya akuntabel secara regulasi, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yupita & Juita, 2020).

Pentingnya peran kepemimpinan terlihat jelas dalam dinamika akuntabilitas keuangan desa, di mana pengaruh kepemimpinan sering kali ditemukan lebih dominan dibandingkan variabel teknis lainnya. Penelitian oleh Taufiq, (2024) menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan prediktor yang lebih konsisten dan kuat dalam menjamin integritas dana desa dibandingkan dengan sekadar kompetensi teknis aparat.

Temuan ini didukung oleh riset di berbagai daerah, seperti di Boyolali dan Bengkalis, yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang baik secara simultan dan parsial memberikan kontribusi positif terutama terhadap pertanggungjawaban dana publik. Tanpa arahan etis dari "nada di puncak" (*tone at the top*), kompetensi aparat sering kali tidak mampu menghasilkan output kinerja yang

optimal bagi kemajuan desa (Ikhwan et al., 2024; Marlina et al., 2021; Rizal & Hermanto, 2019).

Namun demikian, literatur juga menunjukkan adanya anomali di mana kepemimpinan kepala desa terkadang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan atau akuntabilitas. Fenomena ini tercatat dalam studi yang dilakukan di Bantul dan Ambulu, yang mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan secara mandiri tidak selalu bisa menjamin perilaku administratif yang bersih jika tidak dibarengi dengan sistem pengendalian internal yang kuat serta transparansi publik yang nyata. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di sektor publik desa memerlukan dukungan dari variabel moderasi, seperti komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi (SISKEUDES), agar pengaruhnya dapat dirasakan secara merata dalam sistem birokrasi desa.

Aspek krusial lain dari kepemimpinan desa adalah kemampuan koordinasi antarlembaga, khususnya antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegagalan dalam penyusunan peraturan desa dan sinkronisasi kebijakan sering kali berakar pada lemahnya peran kepemimpinan dalam mengintensifkan komunikasi dan kontinuitas hubungan kerja. Pemimpin desa yang efektif harus memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan yang intensif namun demokratis terhadap perangkat di bawahnya, termasuk ketua RT dan RW, guna memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan dan diimplementasikan dengan baik hingga ke unit terkecil masyarakat. Koordinasi yang buruk cenderung memicu konflik internal yang menghambat otonomi desa dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Terakhir, di era transformasi saat ini, kepemimpinan desa dituntut untuk memiliki

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dimensi kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*) dan kepekaan terhadap inovasi digital. Kemampuan pemimpin untuk memobilisasi sumber daya manusia dan mengelola potensi lokal melalui jiwa kewirausahaan terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola dan kinerja organisasi desa secara keseluruhan. Integrasi antara kecerdasan emosional pemimpin dengan profesionalisme aparat menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan anggaran di masa depan. Dengan demikian, menakar pentingnya kepemimpinan di desa berarti melihatnya sebagai kesatuan utuh antara integritas pribadi, kecakapan koordinasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan paradigma pelayanan publik yang semakin dinamis.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan telaah kritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan pilar paling krusial yang menentukan keberhasilan tata kelola dan akuntabilitas di level pemerintahan terkecil. Meskipun aspek kompetensi teknis aparat tetap diperlukan, kualitas kepemimpinan—khususnya yang bersifat partisipatif, transparan, dan memiliki keteladanan—terbukti menjadi prediktor yang lebih konsisten dalam menjamin integritas pengelolaan dana desa serta kinerja pelayanan publik. Ketidakkonsistenan pengaruh kepemimpinan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari komitmen organisasi yang kuat, pengawasan yang demokratis, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir risiko penyimpangan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah perlu mereposisi program pengembangan kapasitas perangkat desa dengan memberikan

porosi yang lebih besar pada penguatan nilai-nilai kepemimpinan berbasis integritas dan kemampuan koordinasi antarlembaga. Peningkatan kompetensi aparat tetap harus dilanjutkan, namun harus diiringi dengan pembentukan ekosistem kerja yang mendukung akuntabilitas, seperti penguatan peran pengawasan masyarakat dan transparansi anggaran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran variabel moderasi seperti budaya organisasi lokal dan kematangan digital dalam memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pembangunan desa guna menciptakan model kepemimpinan yang lebih adaptif bagi tantangan masa depan.

REFERENSI

- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 446–463.
<https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Donkor, F. (2021). Linking Leadership Styles to Employee Performance in the Public Sector Organizations in Ghana: The Role of Organizational Commitment. *International Journal of Business and Management*, 16(5).
- Fauzi, H., Juniarti, A. T., & Sudirman, I. (2023). Competency, Entrepreneurial Leadership, Commitment and Their Impact on Performance through Village Governance. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 66–76.
<https://doi.org/10.33096/jmb.v10i1.480>
- Ferdinandito, A., & Haryani, T. N. (2021). Gaya Kepemimpinan Servant Leadership Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 190–202.
- Hapsari, R. A., & Sudaryanti, S. (2021). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu

- Kabupaten Temanggung). *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 112 – 128. <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385>
- Ikhwan, F. Y., Astuti, D. D., & Rachmawati, L. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ambulu. *Jakuma: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 05(02), 121–137.
- Indranika, D. B., Puspita, D. R., & Faozanudin, M. (2020). Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217>
- Karunia, R.L., Solihati, K.D., Wati, N.K. (2022). Implementation of Good Governance Principles in the Land Transportation Management Center. *KnE Social Sciences*, 1253–1269.
- Lastri, S., & Abdurrahman, R. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pendidikan ...*, 8(2). <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/12958>
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), (1-15).
- Lestari, N. P., Suprihati, S., & Kristiyanti, L. M. S. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis 2023*, 2(2), 327–335. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.47>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.251>
- 7
- Padagi, L. (2013). Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Pardede, R., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-faktor Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 242–252. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/36>
- Pradesa, H. A., & Tanjung, H. (2021). The Effect Of Principal’s Spiritual Leadership Dimension On Teacher Affective Commitment. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 05(03), 69–81. <https://doi.org/10.36418/edv.v1i11.270>
- Prasetyo, A. W. (2019). Telaah Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(2), 105–115.
- Rahman, K., Zainal, Z., & Wardana, D. (2022). Village Head Leadership in Developing Village Potential. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 10(1), 17–22.
- Rasmini, N. K., & Mimba, P. S. H. (2021). The influence of apparatus competence , leadership style , tri hita karana culture and society participation on the effectiveness of village fund management. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 61–75. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2046>
- Ratmono, A. J., Rusmana, O., & Hasanah, U. (2023). Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan (Review of Village Fund Management Accountability: Influence of Competence, Leadership, Community Participation, and Supervisi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 4(4), 273–286. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2315> Tinjauan
- Riyanto, A., & Erman, M. (2017). Pengawasan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/ RW 03 Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 4(2), 1-11.
- Rizal, N. A. A., & Hermanto, S. B. (2019). Peran komitmen organisasi memediasi pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1-19.
- Rizki, M., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Meningkatkan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara (Literature Review). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 208-219. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/33>
- Santika, S., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 266-276. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/38>
- Saputri, E. D., & Muhsin, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memediasi Pengaruh Variabel Keteladanan Pemimpin, Kompetensi Perangkat Desa, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3), 1130-1147. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28345>
- Sawitri, P. I., & Gayatri, G. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 476-489. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p17>
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(2), 1-21.
- Sudarsa, A. G., Nurdin, N., Taufiq, M., & Priyatno, M. (2022). Governance of the Functions Representation and Recruitment of the Golkar Party in Actualize Good Governance in the Reform Era. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 259-274. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40779>
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2019), 378-388. <https://doi.org/10.23887/jipppg.v3i2>
- Sulistiyantoro, D., & Zahara, I. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 185-199.
- Tanjung, H., Salleh, N. S. N. M., & Pradesa, H. A. (2023). Mediating Role of Public Service Motivation in Enhancing the Effect of Spiritual Leadership on Felt Obligation and Affective Commitment. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 864-875. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.49540>
- Taufiq, M. (2024). Village Fund Accountability : Does the Village Chief 's Leadership Matter More Than Officer Competence ? *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 3(4), 583-594. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v3i4.365>
- Taufiq, M., & Harijanto, D. (2023). The Catalyst of Change : Analyzing the Impact of Public Service Motivation on Proactive Work Behavior. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(4), 275-283. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i4.366>
- Wahyuningsih, E., Pratami, Y., & Amrizal, G. (2023). Faktor Penentu Akuntabilitas

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Pengelolaan Dana Desa. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(2), 88–101.
- Yatminiwati, M. (2017). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(1), 1–10. <http://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/5>
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>